



OMBUDSMAN
REPUBLIC INDONESIA



LAPORAN KEUANGAN

2019



AUDITED

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Singkatan	vii
Pernyataan Telah di Reviu	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	4
III. Neraca	5
IV. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	7
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Dasar Hukum	8
A.2. Kebijakan Teknis Ombudsman RI	8
A.3. Pendapat Ombudsman RI	9
A.4. Belanja Ombudsman RI	10
A.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.6. Kebijakan Akuntansi	12
A.7. Basis Akuntansi	25
A.8. Dasar Pengukuran	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	27
B.2. Belanja Negara	28
B.2.1. Belanja Pegawai	29
B.2.2. Belanja Barang	30
B.2.3. Belanja Modal	32
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	33
C.1. Aset Lancar	33
C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	33
C.1.2. Piutang Bukan Pajak	35
C.1.3. Persediaan	36
C.2. Aset Tetap	37
C.2.1. Tanah	37
C.2.2. Peralatan dan Mesin	39

C.2.3. Gedung dan Bangunan	40
C.2.4. Aset Tetap Lainnya	41
C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	42
C.3. Aset Lainnya	43
C.3.1. Aset Tak Berwujud.....	43
C.3.2. Aset Lain-Lain.....	44
C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	45
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	46
C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga	46
C.5. Ekuitas.....	47
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	48
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional.....	48
D.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak	48
D.1.2. Beban Operasional.....	48
D.1.2.1. Beban Pegawai.....	49
D.1.2.2. Beban Persediaan	49
D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa	50
D.1.2.4. Beban Pemeliharaan.....	51
D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas	51
D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	52
D.1.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	52
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional.....	53
D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	53
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	55
E.1. Ekuitas Awal	55
E.2. Surplus (Defisit) LO.....	55
E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas	55
E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap	55
E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	56
E.3.3. Koreksi Lain-Lain.....	56
E.4. Transaksi Antar Entitas	56
E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain	57
E.4.2. Diterima dari Entitas Lain.....	57
E.5. Ekuitas Akhir.....	57
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 Ringkasan LRA 31 Desember 2019 dan 2018	1
TABEL 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018.....	2
TABEL 3 Perbandingan Pendapatan 31 Desember 2019 dan 2018.....	10
TABEL 4 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 2018.....	10
TABEL 5 Kebijakan Akuntansi atas Amortisasi Aset Tak Berwujud	21
TABEL 6 Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	23
TABEL 7 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	24
TABEL 8 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019	27
TABEL 9 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 dan 2018	27
TABEL 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019	28
TABEL 11 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 2018.....	29
TABEL 12 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 2018.....	30
TABEL 13 Perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 2018	31
TABEL 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 2018	32
TABEL 15 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018	32
TABEL 16 Rincian Belanja Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) 31 Desember 2019	34
TABEL 17 Rincian Mutasi Belanja Barang Dibayar di Muka (<i>prepaid</i>) 31 Desember 2019 dan 2018	34
TABEL 18 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018	35
TABEL 19 Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2019 dan 2018	35
TABEL 20 Mutasi Persediaan.....	36
TABEL 21 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018	37
TABEL 22 Nilai Tanah 31 Desember 2019 dan 2018	38
TABEL 23 Nilai Perolehan Tanah 31 Desember 2019	39
TABEL 24 Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Des 2019 dan 2018	39
TABEL 25 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018.....	40
TABEL 26 Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 dan 2018.....	41
TABEL 27 Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018	41
TABEL 28 Nilai Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2019 dan 2018.....	41
TABEL 29 Mutasi Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2019 dan 2018.....	42
TABEL 30 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018	42
TABEL 31 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43
TABEL 32 Rincian Aset Lainnya	43
TABEL 33 Nilai Aset Tak Berwujud 31 Desember 2019 dan 2018.....	44

TABEL 34	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud	44
TABEL 35	Nilai Aset Lain-Lain 31 Desember 2019 dan 2018	44
TABEL 36	Rincian Aset Lain-Lain	45
TABEL 37	Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018	45
TABEL 38	Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	45
TABEL 39	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	46
TABEL 40	Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018	46
TABEL 41	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	47
TABEL 42	Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	47
TABEL 43	Rincian Beban Operasional 31 Desember 2019 dan 2018	48
TABEL 44	Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 2018	49
TABEL 45	Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 2018	49
TABEL 46	Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 2018	50
TABEL 47	Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 2018	51
TABEL 48	Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 2018	51
TABEL 49	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2019 dan 2018	52
TABEL 50	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2019 dan 2018	53
TABEL 51	Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2019 dan 2018	54
TABEL 52	Rincian Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas 31 Desember 2019 dan 2018	55
TABEL 53	Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap 31 Desember 2019 dan 2018	55
TABEL 54	Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2019 dan 2018	56
TABEL 55	Rincian Koreksi Lain-Lain 31 Desember 2019 dan 2018	56
TABEL 56	Rincian Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2019 dan 2018	56
TABEL 57	Rincian Pengesahan Hibah Langsung	57

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
GRAFIK 1 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 dan 2018.....	11
GRAFIK 2 Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019.....	28

KATA PENGANTAR

Ombudsman Republik Indonesia adalah salah satu entitas Pengguna Anggaran/Barang sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Pemerintah yang sehat. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Ombudsman Republik Indonesia. Selain itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2020

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP 19730916 199311 1 001

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
MA	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
RI	: Republik Indonesia
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2019 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Ombudsman Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan terkait lainnya.

Jakarta, April 2020

Inspektur



Marsetiono
NIP. 19660324 199203 1 001



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2020

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sekretaris Jenderal



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP 19730916 199311 1 001

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2019 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp75.534.488,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Rp161.415.619.730,00 atau 98,21% dari anggaran dalam DIPA sebesar Rp164.353.302.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan sebagai berikut:

TABEL 1
Ringkasan LRA 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun Anggaran 2019		Tahun Anggaran 2018	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0	75.534.488	0	131.122.684
Belanja Rupiah Murni	164.353.302.000	161.415.619.730	151.839.556.000	147.588.308.701

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah Rp43.580.532.450,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp2.924.097.557,00 dan Aset Tetap sebesar Rp40.302.390.109,00 serta Aset lainnya sebesar Rp354.044.784,00

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah Rp116.917.314,00. Sedangkan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah Rp43.463.615.136,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan sebagai berikut:

TABEL 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Tanggal Neraca		Nilai Kenaikan/ (Penurunan)
	31-12-2019	31-12-2018	
Aset			
Aset Lancar	2.924.097.557	3.987.581.300	(1.063.483.743)
Aset Tetap	40.302.390.109	22.997.047.403	17.305.342.706
Aset Lainnya	354.044.784	407.411.096	(53.366.312)
Jumlah Aset	43.580.532.450	27.392.039.799	16.188.492.651
Kewajiban			
Utang Kepada Pihak Ketiga	116.917.314	375.211.249	(258.293.935)
Ekuitas			
Ekuitas	43.463.615.136	27.016.828.550	16.446.786.586
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	43.580.532.450	27.392.039.799	16.188.492.651

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.458.076,00 sedangkan jumlah Beban Operasional sebesar Rp172.291.644.077,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(172.287.186.001,00). Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.989.020.963,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(170.298.165.038 ,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan Ekuitas pada Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2019 sebagai berikut:

• Ekuitas Awal 01/01/2019	Rp 27.016.828.550,00
• Defisit Laporan Operasional	(Rp 170.298.165.038,00)
• Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas	Rp 18.637.613.000,00
• Transaksi Antar Entitas	Rp 168.107.338.624,00
• Ekuitas Akhir 31/12/2019	Rp 43.463.615.136,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sedangkan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019		%	2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
➤ Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	75.534.488	0,00	131.122.684
JUMLAH PENDAPATAN		-	75.534.488	0,00	131.122.684
BELANJA	B.2				
➤ Belanja Pegawai		69.882.929.000	69.061.212.442	98,82	59.982.337.390
➤ Belanja Barang		92.883.161.000	90.777.751.515	97,73	84.234.512.644
➤ Belanja Modal		1.587.212.000	1.576.655.773	99,33	3.371.458.667
JUMLAH BELANJA		164.353.302.000	161.415.619.730	98,21	147.588.308.701
➤ Belanja Pegawai	B.2.1	69.882.929.000	69.061.212.442	98,82	59.982.337.390
➤ Belanja Barang	B.2.2	92.883.161.000	90.777.751.515	97,73	84.234.512.644
➤ Belanja Modal	B.2.3	1.587.212.000	1.576.655.773	99,33	3.371.458.667

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. NERACA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2019	31 DES 2018
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
➤ Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.1	1.867.065.556	3.113.505.376
➤ Piutang Bukan Pajak	C.1.2	80.704.123	37.014.633
➤ Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		(403.521)	(185.073)
➤ <i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>		80.300.602	36.829.560
➤ Persediaan	C.1.3	976.731.399	837.246.364
JUMLAH ASET LANCAR		2.924.097.557	3.987.581.300
ASET TETAP	C.2		
➤ Tanah	C.2.1	26.592.174.000	7.315.400.000
➤ Peralatan dan Mesin	C.2.2	42.673.256.004	41.357.097.591
➤ Gedung dan Bangunan	C.2.3	1.357.048.000	0
➤ Aset Tetap Lainnya	C.2.4	4.225.119.385	4.225.119.385
➤ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5	(34.545.207.280)	(29.900.569.573)
JUMLAH ASET TETAP		40.302.390.109	22.997.047.403
ASET LAINNYA	C.3		
➤ Aset Tak Berwujud	C.3.1	848.899.234	764.229.234
➤ Aset Lain-lain	C.3.2	912.570.495	815.822.395
➤ Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(1.407.424.945)	(1.172.640.533)
JUMLAH ASET LAINNYA		354.044.784	407.411.096
JUMLAH ASET		43.580.532.450	27.392.039.799
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
➤ Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	116.917.314	375.211.249
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		116.917.314	375.211.249
JUMLAH KEWAJIBAN		116.917.314	375.211.249
EKUITAS			
➤ Ekuitas	C.5	43.463.615.136	27.016.828.550
JUMLAH EKUITAS		43.463.615.136	27.016.828.550
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		43.580.532.450	27.392.039.799

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN OPERASIONAL

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN OPERASIONAL			
➤ Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1	4.458.076	1.952.852
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1	4.458.076	1.952.852
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2		
➤ Beban Pegawai	D.1.2.1	68.863.018.942	60.219.273.830
➤ Beban Persediaan	D.1.2.2	2.414.329.654	2.453.570.050
➤ Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	44.756.228.088	35.795.536.505
➤ Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	7.064.089.757	5.557.003.631
➤ Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	44.314.757.069	39.741.146.847
➤ Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	4.879.002.119	5.353.182.193
➤ Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	D.1.2.7	218.448	(412.162)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	D.1.2	172.291.644.077	149.119.300.894
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1 - D.1.2)	D.1	(172.287.186.001)	(149.117.348.042)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1	0	(6.341.724)
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2	1.989.020.963	391.197.438
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1 + D.2.2)	D.2	1.989.020.963	384.855.714
SURPLUS/DEFISIT LO (D.1 + D.2)		(170.298.165.038)	(148.732.492.328)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2019	31 DES 2018
EKUITAS AWAL	E.1	27.016.828.550	27.852.569.979
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(170.298.165.038)	(148.732.492.328)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI NILAI EKUITAS	E.3		
➤ Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1	18.637.613.000	0
➤ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	0	300.756.642
➤ Koreksi Lain-Lain	E.3.3	0	138.808.240
Jumlah Koreksi	E.3	18.637.613.000	439.564.882
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
➤ Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	161.415.619.730	147.588.308.701
➤ Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(75.534.488)	(131.122.684)
➤ Pengesahan Hibah Langsung	E.4.2	6.767.253.382	0
Jumlah Transaksi Antar Entitas	E.4	168.107.338.624	147.457.186.017
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(E.2+E.3+E.4)	16.446.786.586	(835.741.429)
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)	E.5	43.463.615.136	27.016.828.550

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standard Reviu atas Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga; dan
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

Rencana Strategis

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA RENCANA STRATEGIS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Sesuai dengan Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia tahun 2016 – 2021, visi Ombudsman Republik Indonesia adalah

“Ombudsman Republik Indonesia yang Berwibawa, Efektif dan Adil”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Memperkuat Kelembagaan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman RI.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.
4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintahan.
5. Memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, ditetapkan tujuan strategis Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan Ombudsman RI yang kuat.
2. Terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Ombudsman RI.
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat terhadap Hak-Hak Dasar melalui Pelayanan Publik.
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Penyelenggara Layanan Publik.
5. Menguatnya Peran Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Maladministrasi dan Korupsi.

Pendapatan

A.3. PENDAPATAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indonesia tidak mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Di dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 Ombudsman Republik Indonesia tidak mencatumkan estimasi pendapatan.

Realisasi PNBP Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp75.534.488,00 yang terdiri atas Pengembalian Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan Lain-Lain.

Di bandingkan dengan 31 Desember 2018 dengan realisasi terdiri atas

PNBP berupa Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL sebesar Rp131.122.684,00.

Perbandingan realisasi pendapatan Negara dan Hibah Ombudsman Republik Indonesia 31 Desember Tahun Anggaran 2019 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2018 disajikan sebagai berikut :

TABEL 3
Perbandingan Pendapatan
31 Desember 2019 Dan 2018

No.	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI PNBP		KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		2019	2018	
1.	Pengembalian Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu	71.039.412	131.122.684	(60.083.272)
2.	Pendapatan Lain-Lain	4.495.076	0	4.495.076
JUMLAH		75.534.488	131.122.684	(55.588.196)

Belanja

A.4. BELANJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Rp161.415.619.730,00 atau 98,21% dari anggaran sebesar Rp164.353.302.000,00 yang keseluruhannya bersumber dari belanja rupiah murni. Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

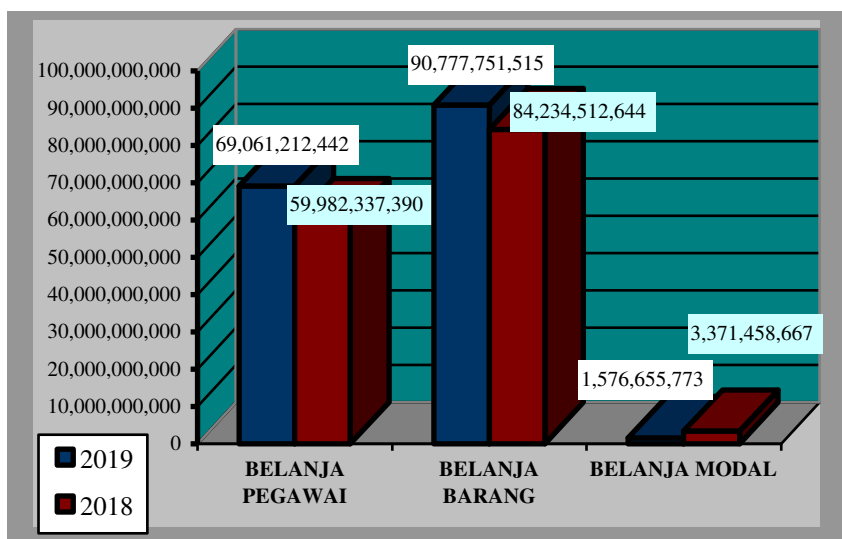
Rincian realisasi belanja Anggaran 31 Desember Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2018 disajikan sebagai berikut :

TABEL 4
Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 2018

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA		KENAIKAN/ (PENURUNAN)
		2019	2018	
51	Belanja Pegawai	69.061.212.442	59.982.337.390	9.078.875.052
52	Belanja Barang	90.777.751.515	84.234.512.644	6.543.238.871
53	Belanja Modal	1.576.655.773	3.371.458.667	(1.794.802.894)
JUMLAH		161.415.619.730	147.588.308.701	13.827.311.029

Komposisi Realisasi Belanja Ombudsman Republik Indonesia 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada grafik berikut ini:

GRAFIK 1.
Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 2018



*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.5. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan 31 Desember 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi dan operasi keuangan pada Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi Ombudsman Republik Indonesia. Laporan Realisasi APBN terdiri atas Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.
2. Neraca
Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi Ombudsman Republik Indonesia dan disusun berdasarkan SAI.
3. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode laporan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
6. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset

dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2019 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia adalah:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Ombudsman Republik Indonesia berasal dari Kegiatan Non-operasional yaitu dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Negara (KUN) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri atas kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan dalam neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi

Investasi adalah aset untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi :

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/ BUMD dan Pemda.

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/ Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan Modal Negara (PMN) pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51% disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Hukum Milik Negara (BUMN/ BHMN). Penyertaan Modal Negara (PMN) pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51% (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Penyertaan Modal Negara (PMN) dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode equitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk

partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan Kurs Tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan Kurs Tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan, yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan

Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/ daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lainnya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

TABEL 5
Kebijakan Akuntansi atas Amortisasi Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang	10
Hak Ekonomis Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

TABEL 6
Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

(9) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2014, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 6

TABEL 7
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Informasi
Pendapatan dan
Belanja Akrual*

(10) Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat, satuan kerja pada kementerian/ lembaga selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual berdasarkan data akrual pada tanggal pelaporan. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual merupakan suplemen yang dilampirkan pada laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa pengguna Anggaran (UAKPA) Tahunan.

Informasi pendapatan secara akrual diperoleh dari realisasi pendapatan berbasis kas dan disesuaikan dengan transaksi pendapatan akrual, sedangkan belanja secara akrual diperoleh dari realisasi belanja berbasis kas disesuaikan dengan transaksi belanja akrual.

Transaksi pendapatan secara akrual terdiri atas :

- a. Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai penambahan pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang pada neraca.
- b. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.

Transaksi belanja secara akrual terdiri atas :

- a. Belanja yang masih harus dibayar disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca.
- b. Belanja dibayar dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang neraca.

Basis Akuntansi

A.7. BASIS AKUNTANSI

Ombudsman RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realiasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.8. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Ombudsman RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp75.534.488*

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah Rp75.534.488,00 yang merupakan pendapatan penerimaan negara bukan pajak.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 8 berikut ini.

TABEL 8.
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2019		
	ESTIMASI	REALISASI	% REALISASI
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4.689.662	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	66.386.750	0
Pendapatan Anggaran Lain	0	4.458.076	0
Jumlah Pendapatan	0	75.534.488	0

Berdasarkan Tabel 9 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 42,39% dari realisasi pendapatan PNBP 31 Desember Tahun Anggaran 2018.

TABEL 9.
Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2018	% Naik (Turun)
Pendapatan BMN	0	27.110.382	(100)
Pendapatan Jasa Giro	0	272.602	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.689.662	26.112.072	(82,04)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	66.386.750	63.337.700	4,81
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12.609.678	(100)
Pendapatan Anggaran Lain	4.458.076	1.680.250	165,32
Jumlah Pendapatan	75.534.488	131.122.684	(42,39)

Pendapatan pada Ombudsman RI merupakan pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, serta Pendapatan Anggaran Lainnya yang telah di setorkan ke Kas Negara selama tahun 2019. Daftar rincian PNPB Tahun 2019 (lihat lampiran pendukung).

*Realisasi Belanja Negara
Rp161.415.619.730*

B.2. Belanja Negara

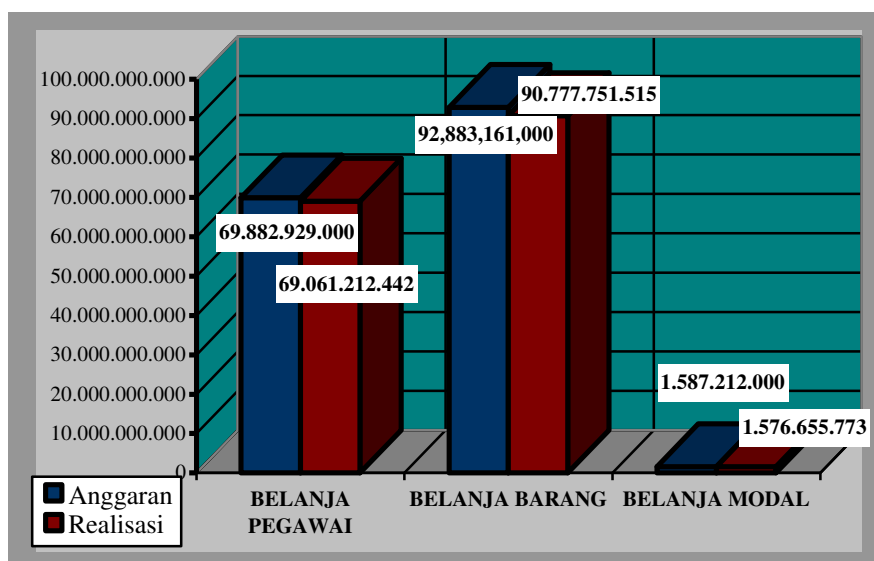
Realisasi belanja Ombudsman Republik Indonesia pada 31 Desember Tahun Anggaran 2019 adalah Rp161.415.619.730,00 atau 98,21% dari anggaran senilai Rp164.353.302.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 10.
Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	69.882.929.000	69.061.212.442	98,82
Belanja Barang	92.883.161.000	90.777.751.515	97,73
Belanja Modal	1.587.212.000	1.576.655.773	99,33
Total Belanja	164.353.302.000	161.415.619.730	98.21

Komposisi anggaran dan realisasi belanja 31 Desember TA 2019 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

GRAFIK 2.
Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019



Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada 31 Desember Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,37 persen dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember Tahun Anggaran 2018.

TABEL 11.
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 2018

JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2019	REALISASI 31 Desember 2018	% Naik(Turun)
Belanja Pegawai	69.061.212.442	59.982.337.390	15,14
Belanja Barang	90.777.751.515	84.234.512.644	7,77
Belanja Modal	1.576.655.773	3.371.458.667	(53,23)
Jumlah Belanja	161.415.619.730	147.588.308.701	9,37

Kenaikan Realisasi Belanja disebabkan oleh:

1. Penambahan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, dalam rangka mendukung rencana kerja strategis.
2. Penambahan kegiatan substansi sesuai dengan RPJMN 2015-2019.
3. Penambahan pegawai dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Ombudsman Republik Indonesia.
4. Penambahan CPNS PKN-STAN sebanyak 14 orang.
5. Penambahan CPNS Formasi Umum sebanyak 53 orang.

Belanja Pegawai
Rp69.061.212.442

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Ombudsman Republik Indonesia pada 31 Desember Tahun Anggaran 2019 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Honorarium; dan Belanja Tunjangan Khusus.

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2019 dan 31 Desember Tahun Anggaran 2018 masing-masing sebesar Rp69.061.212.442,00 dan Rp59.982.337.390,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

TABEL 12.
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
31 Desember 2019 dan 2018

JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2019	REALISASI 31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	12.271.206.452	7.567.787.730	62,15
Belanja Honorarium	18.867.330.400	19.133.395.303	(1,39)
Belanja Tunjangan Khusus	37.922.675.711	33.281.154.407	13,95
Jumlah Belanja Kotor	69.061.212.563	59.982.337.440	15,14
Pengembalian Belanja Pegawai	(121)	(50)	142
Jumlah Belanja Bersih	69.061.212.442	59.982.337.390	15,14

Berdasarkan Tabel tersebut realisasi belanja pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 15,14% dari realisasi belanja pegawai 31 Desember Tahun Anggaran 2018.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
2. Adanya pelantikan pejabat struktural di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
3. Penambahan CPNS PKN-STAN sebanyak 14 orang.
4. Penambahan CPNS Formasi Umum sebanyak 53 orang.

Belanja Barang
Rp90.777.751.515

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp90.777.751.515,00 dan Rp84.234.512.644,00.

Berdasarkan Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 7,77% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan Sumber Daya Manusia dan terjadi perubahan struktur Sekretariat Jenderal menjadi 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Ombudsman Republik Indonesia.

TABEL 13.
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2019	REALISASI 31 Desember 2018	% NAIK (TURUN)
Belanja Barang Operasional	11.388.765.232	10.563.997.678	7,81
Belanja Barang Persediaan	2.639.798.188	2.131.223.549	23,86
Belanja Barang Non Operasional	7.201.668.928	7.705.776.373	(6,54)
Belanja Jasa	18.094.441.875	17.364.706.060	4,20
Belanja Pemeliharaan	7.083.245.223	6.807.814.014	4,05
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	44.620.694.090	40.686.077.932	9,67
Belanja Perjalanan Luar Negeri	435.095.917	467.956.075	(7,02)
Jumlah Belanja Kotor	91.463.709.453	85.727.551.681	6,69
Pengembalian Belanja	(685.957.938)	(1.493.039.037)	(54,06)
Jumlah Belanja Bersih	90.777.751.515	84.234.512.644	7,77

Terdapat pengembalian belanja barang sebesar Rp685.957.938,00 selama tahun 2019 (lihat lampiran pendukung).

Belanja Modal
Rp1.576.655.773

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.576.655.773,00 dan Rp3.371.458.667,00. Realisasi terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.437.150.773,00 dan Belanja Modal Lainnya sebesar Rp139.505.000,00. Rincian realisasi Belanja Modal dapat dilihat pada tabel.

TABEL 14.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2019	REALISASI 31 Desember 2018	%(NAIK /TURUN)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.437.150.773	3.146.170.667	(54,32)
Belanja Modal Lainnya	139.505.000	225.288.000	(38,08)
Jumlah Belanja Kotor	1.576.655.773	3.371.458.667	(53,24)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Bersih	1.576.655.773	3.371.458.667	(53,24)

Realisasi Belanja Modal 31 Desember Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar 53,23% bersamaan dengan penurunan Anggaran Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2019.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar
Rp2.924.097.557

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.924.097.557,00 dan Rp3.987.581.300,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 15.
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018

NO	ASET LANCAR	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Belanja Dibayar Dimuka	1.867.065.556	3.113.505.376
2	Piutang Bukan Pajak	80.704.123	37.014.633
3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(403.521)	(185.073)
4	<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>80.300.602</i>	<i>36.829.560</i>
5	Persediaan	976.731.399	837.246.364
	Jumlah	2.924.097.557	3.987.581.300

Belanja Dibayar Dimuka
Rp1.867.065.556

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah Rp1.867.065.556,00 dan Rp3.113.505.376,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang/jasa belum diterima. Belanja Dibayar Dimuka merupakan Belanja Barang yang Dibayar Dimuka dengan rincian dalam tabel berikut.

TABEL 16.
Rincian Belanja Barang Dibayar di Muka (*prepaid*)
31 Desember 2019 dan 2018

NO	JENIS	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Pembayaran Sewa Kendaraan	16.250.580	1.367.051.471
2	Pembayaran Sewa Gedung Kantor	1.797.853.430	1.592.603.770
3	Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	49.060.622	81.713.177
4	Belanja Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak RFID	3.900.924	72.136.958
Jumlah		1.867.065.556	3.113.505.376

Mutasi tambah dan mutasi kurang dari Belanja Barang Dibayar di Muka (*prepaid*) disajikan pada tabel berikut.

TABEL 17.
Rincian Mutasi Belanja Barang Dibayar di Muka (*prepaid*) 31 Desember
2019 dan 2018

URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
Saldo Awal per 1 Januari	3.113.505.376	3.120.991.906
Mutasi Kurang:		
Pembayaran Sewa Kendaraan	1.367.051.471	1.358.496.046
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	1.592.603.770	1.762.495.860
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	81.713.177	0
Pembayaran Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak RFID	72.136.958	0
Mutasi Tambah:		
Pembayaran Sewa Kendaraan	16.250.580	1.367.051.471
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	1.797.853.430	1.592.603.770
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	49.060.622	81.713.177
Belanja Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak RFID	3.900.924	72.136.958
Saldo Akhir per 31 Desember	1.867.065.556	3.113.505.376

Piutang Bukan
Pajak
Rp80.300.602

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp80.300.602,00 disebabkan telah dibayarkannya oleh masing-masing pegawai Ombudsman Republik Indonesia. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 18.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018

NO	JENIS	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Piutang atas Kelebihan Pembayaran Uang Makan	54.335.000	0
2	Piutang atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja	26.369.123	37.014.633
Piutang Bukan Pajak		80.704.123	37.014.633
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak		(403.521)	(185.073)
Piutang Bukan Pajak (Netto)		80.300.602	36.829.560

Mutasi tambah dan mutasi kurang dari Piutang Bukan Pajak disajikan pada tabel berikut.

TABEL 19.

Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo Awal	37.014.633	119.447.063
Mutasi Masuk :		
Pelunasan Piutang atas Kelebihan Pembayaran Uang Makan	0	82.420.000
Pelunasan Piutang atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja	37.014.633	37.027.063
Mutasi Keluar :		
Piutang atas Kelebihan Pembayaran Uang Makan	54.335.000	0
Piutang atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja	26.369.123	37.014.633
Saldo Akhir	80.704.123	37.014.633

Persediaan
Rp976.731.399

C.1.4. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah Rp976.731.399,00 dan Rp837.246.364,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Mutasi Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 20.
Mutasi Persediaan

URAIAN	KODE AKUN	31 DES 2019	31 DES 2018
Saldo Awal per 1 Januari		837.246.364	878.410.028
Mutasi Tambah:			
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	521811	2.639.798.188	2.131.223.549
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	491511	1.215.729.904	485.192.520
Mutasi Kurang:			
Beban Persediaan Konsumsi	593111	2.414.309.654	2.453.510.050
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	593113	244.000	2.442.860
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	593311	1.293.994.353	196.054.532
Beban Persediaan Suku Cadang	593114	120.000	210.000
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	593121	20.000	60.000
Kesalahan Pembebanan Akun 521811		7.355.050	5.302.291
Saldo Akhir per 31 Desember		976.731.399	837.246.364

Persediaan senilai Rp976.731.399 pada Ombudsman RI merupakan Barang Konsumsi dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran Pendukung.

*Aset Tetap**Rp40.302.390.109***C.2. Aset Tetap**

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing tersaji sebesar Rp40.302.390.109,00 dan Rp22.997.047.403,00. Aset Tetap yang disajikan merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 21.
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018

NO	JENIS	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Tanah	26.592.174.000	7.315.400.000
2	Peralatan dan Mesin	42.673.256.004	41.357.097.591
3	Gedung dan Bangunan	1.357.048.000	0
4	Aset Tetap Lainnya	4.225.119.385	4.225.119.385
Jumlah		74.847.597.389	52.897.616.976
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(34.545.207.280)	(29.900.569.573)
Nilai Buku Aset Tetap		40.302.390.109	22.997.047.403

Berdasarkan PMK No.107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, setelah melakukan tindak lanjut atas Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-44/KN/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2018-2019, dan dijelaskan kembali dalam Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Keuangan RI Nomor S-15/KN/2019 tentang Penyampaian Pedoman Pelaksanaan Koreksi Hasil Revaluasi BMN, hasil revaluasi aset disajikan pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan Tahun 2019. Kondisi tersebut menyebabkan adanya peningkatan nilai Aset Tetap berupa Tanah dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Unaudited*) sebesar Rp18.637.613.000,00

Tanah
Rp26.592.174.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia merupakan transfer dari BPKP Perwakilan D.I.Yogyakarta seluas 895 m² dan Sumatera Barat 2.188 m² untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST-350/SU/05/2014 Tanggal 24 Februari 2014. Nilai tanah yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia adalah sebesar Rp7.315.400.000,00. Tanah tersebut sudah memiliki gambar gedung (blue print) tetapi belum di bangun karena keterbatasan kesediaan anggaran Ombudsman Republik Indonesia.

Pada bulan Januari 2018 dilakukan penilaian kembali atas nilai tanah oleh Tim Pelaksana Penilai Kembali Barang Milik Negara menjadi sebesar Rp25.847.516.000,00 atas tanah di Perwakilan D.I.Yogyakarta dan Sumatera Barat.

Pada Tahun 2019, Ombudsman Republik Indonesia menerima hibah berupa tanah dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp 639.161.000,00 di Perwakilan Lampung seluas 1.160 m² sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST-001/WKN.05/KNL.03/2019 Tanggal 23 Mei 2019.

Setelah dilaksanakannya Tindak Lanjut atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2018-2019 yang dilakukan di tahun 2019, terdapat kenaikan nilai revaluasi aset berupa tanah di Perwakilan D.I. Yogyakarta dan Sumatera Barat Rp105.497.000,00 sehingga total nilai aset berupa tanah milik Ombudsman Republik Indonesia menjadi sebesar Rp26.592.174.000,00. Rincian nilai Tanah Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 22.

Nilai Tanah 31 Desember 2019 dan 2018

NO	PERWAKILAN	31 DES 2019	31 DES 2018
1	D. I. Yogyakarta	15.363.668.000	4.689.800.000
2	Sumatera Barat	10.589.345.000	2.625.600.000
3	Lampung	639.161.000	0
Jumlah		26.592.174.000	7.315.400.000

Terdapat kenaikan nilai saldo aset berupa tanah sebesar Rp18.637.613.000,00 dengan rincian kenaikan nilai aset tanah di perwakilan D. I. Yogyakarta sebesar Rp10.673.868.000,00 dan di perwakilan Sumatera Barat sebesar Rp7.963.745.000,00. Perbedaan nilai atas hasil revaluasi aset tetap tanah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 23.
Nilai Perolehan Tanah per 31 Desember 2019

NO	PERWAKILAN	NILAI PEROLEHAN	PENILAIAN KEMBALI	NILAI PEROLEHAN
1	D. I. Yogyakarta	4.689.800.000	10.673.868.000	15.363.668.000
2	Sumatera Barat	2.625.600.000	7.963.745.000	10.589.345.000
3	Lampung	639.161.000	0	639.161.000
Jumlah		7.954.561.000	18.637.613.000	26.592.174.000

Peralatan dan Mesin
Rp42.673.256.004

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp42.673.256.004,00 dan Rp41.357.097.591,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp33.911.399.058,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp8.761.856.946,00. Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 24.
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Des 2019 dan 2018

NO	URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
1	Alat Bantu	121.752.090	122.727.090
2	Alat Angkutan Darat	10.109.321.243	10.109.321.243
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	82.177.000	82.177.000
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.652.383.067	14.168.471.367
5	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.272.441.809	2.212.544.759
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	195.860.800	178.372.050
7	Alat Laboratorium	7.000.000	26.488.750
8	Alat Persenjataan	83.944.500	83.944.500
9	Komputer	15.024.227.495	14.254.050.832
10	Alat Kerja Penerbangan	90.900.000	90.900.000
11	Peralatan Proses/Produksi	12.200.000	12.200.000
12	Peralatan Olah Raga	21.048.000	15.900.000
Jumlah		42.673.256.004	41.357.097.591

Terdapat kenaikan nilai peralatan dan mesin selama tahun 2019 sebesar Rp1.316.158.413,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

TABEL 25.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
Nilai Perolehan Awal	41.357.097.591	40.151.199.049
Mutasi tambah:		
Pembelian	1.412.906.513	3.113.470.665
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	227.416.025
Saldo Awal	0	169.218.300
Mutasi kurang:		
Penghapusan Aset	0	2.251.462.298
Penghentian Aset dari Penggunaan	96.748.100	52.744.150
Saldo per 31 Desember Akhir	42.673.256.004	41.357.097.591
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember	(33.911.399.058)	(29.564.103.963)
Nilai Buku per 31 Desember	8.761.856.946	11.792.993.628

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin berupa penambahan dari pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp1.412.906.513,00 dan penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp96.748.100,00.

*Gedung dan
Bangunan
Rp1.357.048.000*

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia merupakan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia seluas 423 m² untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: BAST-001/WKN.05/KNL.03/2019 Tanggal 23 Mei 2019. Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia adalah sebesar Rp1.357.048.000,00.

TABEL 26.
Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018

NO	PERWAKILAN	31 DES 2019	31 DES 2018
1	Lampung	1.357.048.000	0
Jumlah		1.357.048.000	0

Terdapat akumulasi penyusutan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.140.960,00. Nilai buku aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.329.907.040,00. Mutasi nilai aset dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 27.
Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
Saldo per 01 Januari	0	0
Mutasi tambah:		
Hibah Gedung dan Bangunan	1.357.048.000	0
Saldo per 31 Desember	1.357.048.000	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember	(27.140.960)	0
Nilai Buku	1.329.907.040	0

Aset Tetap Lainnya
Rp4.225.119.385

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp4.225.119.385,00 dan Rp4.225.119.385,00.

Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 28.
Nilai Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2019 dan 2018

NO	URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
1	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	4.174.183.910	4.174.183.910
2	Bahan Perpustakaan Tercetak	35.135.475	35.135.475
3	Alat Bercorak Kebudayaan	15.800.000	15.800.000
Jumlah		4.225.119.385	4.225.119.385

Tidak ada perubahan nilai aset tetap lainnya selama tahun 2019. Mutasi nilai aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

TABEL 29.

Mutasi Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
Saldo per 01 Januari	4.225.119.385	3.069.208.880
Mutasi tambah:		
Pembelian	0	0
Koreksi Nilai	0	1.155.910.505
Mutasi kurang:		
Koreksi nilai	0	0
Saldo per 31 Desember	4.225.119.385	4.225.119.385
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember	(606.667.262)	(336.465.610)
Nilai Buku	3.618.452.123	3.888.653.775

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(34.545.207.280)*

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah Rp(34.545.207.280,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap.

TABEL 30.

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NO	URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.911.399.058	29.564.103.963
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.140.960	0
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	606.667.262	336.465.610
Jumlah		34.545.207.280	29.900.569.573

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 31.
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Tanah	26.592.174.000	0	26.592.174.000
2	Peralatan dan Mesin	42.673.256.004	33.911.399.058	8.761.856.946
3	Gedung dan Bangunan	1.357.048.000	27.140.960	1.329.907.040
4	Aset Tetap Lainnya	4.225.119.385	606.667.262	3.618.452.123
Jumlah		74.847.597.389	34.545.207.280	40.302.390.109

Aset Lainnya
Rp354.044.784

C.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp354.044.784,00 dan Rp407.411.096,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada tabel berikut.

TABEL 32.
Rincian Aset Lainnya

NO	URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
1	Aset Tak Berwujud	848.899.234	764.229.234
2	Aset Lain-lain	912.570.495	815.822.395
Jumlah		1.761.469.729	1.580.051.629
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(1.407.424.945)	(1.172.640.533)
Nilai Buku per 31 Desember		354.044.784	407.411.096

Aset Tak Berwujud
Rp848.899.234

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp848.899.234,00 dan Rp764.229.234,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Ombudsman Republik Indonesia berupa *software* dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 33.

Nilai Aset Tak Berwujud 31 Desember 2019 dan 2018

NO	URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
1	Software Komputer	803.899.234	719.229.234
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	45.000.000	45.000.000
Jumlah		848.899.234	764.229.234

Terdapat kenaikan nilai aset tak berwujud selama tahun 2019 sebesar Rp84.670.000,00. Mutasi nilai aset tak berwujud tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut.

TABEL 34.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

NO	URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
Saldo Awal Tahun		764.229.234	669.729.234
1.	Pembelian Software	84.670.000	49.500.000
2.	Penambahan Aset Tak Berwujud Lainnya	0	45.000.000
Jumlah 31 Desember		848.899.234	764.229.234

Terdapat penambahan nilai terhadap ATB berupa *Software* sebesar Rp84.670.000,00 sampai dengan 31 Desember 2019.

Aset Lain-Lain
Rp912.570.495

C.3.2. Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp912.570.495,00 dan Rp815.822.395,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Ombudsman Republik Indonesia serta dalam proses penghapusan dari Barang Milik Negara.

TABEL 35.

Nilai Aset Lain-Lain 31 Desember 2019 dan 2018

NO	URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	617.873.095	521.124.995
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	294.697.400	294.697.400
Jumlah		912.570.495	815.822.395

Terdapat penambahan nilai Aset lain-lain selama tahun 2019. Adapun mutasi aset lain-lain dapat dijelaskan pada tabel berikut.

TABEL 36.
Rincian Aset Lain-Lain

URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
SALDO AWAL TAHUN	815.822.395	815.822.395
Mutasi Tambah:		
Reklasifikasi dari aset tetap	96.748.100	0
Mutasi Kurang:		
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0	0
Penghapusan BMN	0	0
Saldo Akhir per 31 Desember	912.570.495	815.822.395

*Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(1.407.424.945)*

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp(1.407.424.945,00). Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian/pengamortisian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

TABEL 37.
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 2018

NO	URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	607.679.996	509.078.084
2	Akumulasi Amortisasi Software	600.971.109	464.788.609
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	198.773.840	198.773.840
Jumlah		1.407.424.945	1.172.640.533

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 38.
Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Aset Tak Berwujud	848.899.234	600.971.109	247.928.125
2	Aset Lain-Lain	912.570.495	806.453.836	106.116.659
Jumlah		1.761.469.729	1.407.424.945	354.044.784

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp116.917.314*

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp116.917.314,00 dan Rp375.211.249,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Ombudsman Republik Indonesia per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 39.
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 DES 2019	31 DES 2018
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	116.917.314	375.211.249
2	Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah		116.917.314	375.211.249

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp116.917.314*

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Ombudsman RI per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp116.917.314,00 dan Rp375.211.249,00. Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri atas Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar. Terdapatnya Utang Kepada Pihak Ketiga Ombudsman Republik Indonesia adalah akibat belum terbayarkannya tagihan-tagihan yang sudah selesai pekerjaannya sampai dengan tanggal neraca, disajikan pada tabel berikut.

TABEL 40.
Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018

NO	URAIAN	31 DES 2019	31 DES 2018
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	0	154.504.010
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	116.917.314	220.707.239
Jumlah		116.917.314	375.211.249

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut.

TABEL 41.
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian	31 DES 2019	31 DES 2018
SALDO AWAL TAHUN	375.211.249	329.574.269
Pengurangan:		
Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya	(220.707.239)	(190.766.029)
Penghapusan Utang Honorarium Tahun 2015	0	(126.050.000)
Koreksi Utang (PD. PAL JAYA)	0	(12.758.240)
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	(154.504.010)	0
Sisa Utang Tahun Berjalan	0	0
Penambahan:		
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	0	154.504.010
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	116.917.314	220.707.239
Utang Pihak Ketiga Lainnya	0	0
Saldo per 31 Desember	116.917.314	375.211.249

Rincian total Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp116.917.314,00 sebagai berikut.

TABEL 42.
Rincian Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019
1	LTGA dan Pos di 31 Kantor Perwakilan Ombudsman RI	105.751.314
2	Tagihan Majalah/Koran Perwakilan Jawa Barat	1.266.000
3	Sewa Sarana dan Prasarana Perwakilan Sumatera Selatan	9.900.000
Jumlah		116.917.314

Total Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp116.917.314,00 belum terbayarkan hingga akhir tahun dan telah di reviu serta di verifikasi oleh Inspektorat.

Ekuitas
Rp43.463.615.136

C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp43.463.615.136,00 dan Rp27.016.828.550,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Rp(172.287.186.001)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2019 dan 2018 masing-masing minus Rp172.287.186.001,00 dan minus Rp149.117.348.042,00. Jumlah tahun 2019 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp4.458.076,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp172.291.644.077,00.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp4.458.076

D.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Operasional Ombudsman Republik Indonesia merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pendapatan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji dan Pendapatan Anggaran Lain-lain.

Nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk 31 Desember Tahun 2019 dan 31 Desember Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.458.076,00 dan Rp1.952.852,00.

Beban Operasional Rp172.291.644.077

D.1.2 Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp172.291.644.077,00 dan Rp149.119.300.894,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional Tahun 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

TABEL 43.

Rincian Beban Operasional 31 Desember 2019 dan 2018

JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Pegawai	68.863.018.942	60.219.273.830	14,35
Beban Persediaan	2.414.329.654	2.453.570.050	(1,60)
Beban Barang dan Jasa	44.756.228.088	35.795.536.505	25,03
Beban Pemeliharaan	7.064.089.757	5.557.003.631	27,12
Beban Perjalanan Dinas	44.314.757.069	39.741.146.847	11,51
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.879.002.119	5.353.182.193	(8,86)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	218.448	(412.162)	153
TOTAL	172.291.644.077	149.119.300.894	15,54

Beban Pegawai
Rp68.863.018.942

D.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai untuk 31 Desember Tahun 2019 dan 31 Desember Tahun 2018 adalah masing-masing sebesar Rp68.863.018.942,00 dan Rp60.219.273.830,00. Penambahan Beban Gaji dan Tunjangan PNS berasal dari pengadaan CPNS Tahun 2019 sebanyak 67 orang.

Rincian Beban Pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 44.
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 2018

JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	12.180.325.492	7.686.753.690	58,46
Beban Honorarium	18.867.330.400	19.133.395.303	(1,39)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	37.815.363.171	33.399.124.887	13,22
Jumlah Beban Kotor	68.863.019.063	60.219.273.880	14,35
Pengembalian Beban Pegawai	(121)	(50)	(142)
Jumlah Beban Bersih	68.863.018.942	60.219.273.830	14,35

Beban Persediaan
Rp2.414.329.654

D.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, yang dipakai untuk kegiatan operasional maupun non operasional. Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.414.329.654,00 dan Rp2.453.510.050,00. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 45.
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 2018

JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	2.414.309.654	2.453.510.050	(1,60)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	20.000	60.000	(66,67)
Total	2.414.329.654	2.453.570.050	(1,60)

Beban Barang dan
Jasa
Rp44.756.228.088

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp44.756.228.088,00 dan Rp35.795.536.505,00. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 46.
Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 2018

JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	9.699.699.575	8.897.124.942	9,02
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.184.699.924	1.076.109.777	10,09
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	469.920.000	557.352.000	(15,69)
Beban Barang Operasional Lainnya	71.029.839	0	100
Beban Bahan	4.499.372.461	4.883.279.231	(7,86)
Beban Honor Output Kegiatan	710.175.000	1.371.998.123	(48,24)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.946.046.467	1.476.697.142	31,78
Beban Langganan Listrik	2.261.585.648	1.977.250.275	14,38
Beban Langganan Telepon	323.451.737	340.135.650	(4,91)
Beban Langganan Air	185.546.382	177.351.190	4,62
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.118.287.885	1.251.989.519	(10,68)
Beban Sewa	9.371.331.866	8.977.741.614	4,38
Beban Jasa Profesi	947.098.000	971.729.780	(2,53)
Beban Jasa Lainnya	11.800.928.544	3.797.132.760	210,78
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	167.054.760	39.644.502	321,38
Jumlah Beban Barang dan Jasa	44.756.228.088	35.795.536.505	25,03

Beban Pemeliharaan
Rp7.064.089.757

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.064.089.757,00 dan Rp5.557.003.631,00.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 47.

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 2018

JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.987.777.129	2.703.368.649	47,51
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.075.948.628	2.850.982.122	7,89
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	244.000	2.442.860	(90,01)
Beban Persediaan suku cadang	120.000	210.000	(42,86)
Jumlah Beban Pemeliharaan	7.064.089.757	5.557.003.631	27,12

Beban Perjalanan Dinas
Rp44.314.757.069

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp44.314.757.069,00 dan Rp39.741.146.847,00. Rincian beban perjalanan dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 48.

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 2018

JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	23.592.921.513	23.568.689.987	0,10
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.506.220.000	1.669.846.000	(9,80)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.183.149.944	10.261.614.812	38,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4.600.360.828	3.786.016.279	21,51
Beban Perjalanan Luar Negeri	432.104.784	454.979.769	(5,03)
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	44.314.757.069	39.741.146.847	11,51

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp4.879.002.119

D.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.879.002.119,00 dan Rp5.353.182.193,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 49.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2019 dan 2018

JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.438.523.195	4.975.254.195	(10,79)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.140.960	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	270.201.652	235.783.218	14,60
Beban Amortisasi Software	136.182.500	126.268.029	7,85
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	6.953.812	15.876.751	(56,20)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.879.002.119	5.353.182.193	(8,86)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp218.448

D.1.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2019 berasal dari Pembayaran Piutang Bukan Pajak atas kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Ombudsman RI Tahun Anggaran 2019 untuk bulan November dan Desember. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp218.448,00.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 50.
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2019 dan 2018

JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	218.448	(412.162)	(153)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	218.448	(412.162)	(153)

*Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Rp1.989.020.963*

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.989.020.963,00 dan Rp384.855.855,00. Jumlah Suplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.989.020.963,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.989.020.963,00.

*Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp1.989.020.963*

D.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(6.341.724). Pada tahun 2019 tidak terjadi Pelepasan Aset Non Lancar pada Ombudsman RI.

D.2.2 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.989.020.963,00 dan Rp391.197.438,00. Jumlah Suplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp1.989.020.963,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.283.015.316,00 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.293.994.353,00. Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 51.
Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
Penerimaan			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.689.662	26.112.072	(82,04)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	66.386.750	63.337.700	4,81
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12.609.000	(100)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1.996.209.000	0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.215.729.904	485.192.520	150,56
Beban			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1.293.994.353	196.054.970	560,01
Jumlah	1.989.020.963	391.196.322	408,44

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp27.016.828.550

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp27.016.828.550,00 dan Rp27.852.569.979,00.

Surplus/(Defisit) LO
Rp(170.298.165.038)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar minus Rp170.298.165.038,00 dan minus Rp148.732.492.328,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas
Rp18.637.613.000

E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp18.637.613.000,00 dan Rp439.564.882,00. Jumlah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersebut terdiri atas:

TABEL 52.

Rincian Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas
31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Selisih Revaluasi Aset Tetap	18.637.613.000	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	300.756.642
Koreksi Lain-Lain	0	138.808.240
TOTAL	18.637.613.000	439.564.882

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp18.637.613.000

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp18.637.613.000,00 dan Rp0,00.

TABEL 53.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap 31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Selisih Revaluasi Aset	18.637.613.000	0
TOTAL	18.637.613.000	0

Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan hasil revaluasi aset tetap berupa Tanah pada tahun 2018 sebesar Rp18.532.116.000,00 dan tahun 2019 sebesar Rp105.497.000,00 sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-15/KN/2019 tentang Penyampaian Pedoman Pelaksanaan Koreksi Hasil Revaluasi BMN yang dapat dicatat pada Tahun Anggaran 2019.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp0

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp300.756.642,00.

TABEL 54.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
31 Desember 2019 dan 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	300.756.642
TOTAL	0	300.756.642

Koreksi Lain-Lain
Rp0

E.3.3. Koreksi Lain-Lain

Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp138.808.240,00.

TABEL 55.

Rincian Koreksi Lain-Lain 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Koreksi Lain-Lain	0	138.808.240
TOTAL	0	138.808.240

Transaksi Antar
Entitas
Rp168.107.338.624

E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp168.107.338.624,00 dan Rp147.457.186.017,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri atas:

TABEL 56.

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ditagihkan Ke Entitas Lain	161.415.619.730	147.588.308.701
Diterima Dari Entitas Lain	(75.534.488)	(131.122.684)
Pengesahan Hibah Langsung	6.767.253.382	0
TOTAL	168.107.338.624	147.457.186.017

*Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp161.415.619.730*

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp161.415.619.730,00 dan Rp147.588.308.701,00. Jumlah per 31 Desember 2019 merupakan realisasi belanja yang telah di terima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2019.

Diterima dari Entitas Lain Rp(75.534.488)

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar minus Rp75.534.488,00 dan minus Rp131.122.684,00. Jumlah per 31 Desember 2019 merupakan penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, penerimaan belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu, serta Pendapatan Anggaran Lainnya yang telah di setorkan ke Kas Negara selama tahun 2019.

*Pengesahan Hibah Langsung
Rp6.767.253.382*

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung

Jumlah Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp6.767.253.382,00 dan Rp0,00. Jumlah per 31 Desember 2019 berasal dari Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa sebagai berikut:

TABEL 57.
Rincian Pengesahan Hibah Langsung

NO	PEMBERI HIBAH	NOMOR BAST	NOMINAL
1	US Agency for International Development (USAID)	112/USAID-INA/BAST-Service/DRG	3.926.355.099
2	Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)	B/4867/PL.02.06/XII/2019	2.840.898.283
TOTAL			6.767.253.382

*Ekuitas Akhir
Rp43.463.615.136*

E.5. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp43.463.615.136,00 dan Rp27.016.828.550,00. Jumlah per 31 Desember 2019 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp43.580.532.450,00 di kurangi nilai Kewajiban sebesar Rp116.917.314,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Pengungkapan Penting Lain-Lain sebagai berikut:

1. Sampai dengan per 31 Desember 2019 terdapat revisi RKA-KL sebanyak tiga kali yaitu:
 - Revisi I tanggal 16 Mei 2019
(No. Revisi DIPA-110.01.1.439624/2019 Revisi ke 01).
 - Revisi II tanggal 16 Oktober 2019
(No. Revisi DIPA-110.01.1.439624/2019 Revisi ke 02).
 - Revisi III tanggal 02 Desember 2019
(No. Revisi DIPA-110.01.1.439624/2019 Revisi ke 03).
2. Sampai dengan per 31 Desember 2019 terdapat perubahan anggaran sebesar:
 - Penambahan Rp13.508.922.000,00 untuk alokasi Belanja Pegawai semula Rp56.374.007.000,00 menjadi Rp69.882.929.000,00
 - Pengurangan Rp551.807.000,00 untuk alokasi Belanja Barang semula Rp93.434.968.000,00 menjadi Rp92.883.161.000,00, dan
 - Penambahan Rp677.432.000,00 untuk alokasi Belanja Modal semula Rp909.780.000,00 menjadi Rp1.587.212.000,00.
3. Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Jasa yang terealisasi selama tahun anggaran 2019 sebagai berikut:
 - Nomor Register 2DS44SFA – *Implementation Development Objective 1 (DO1) Democratic Governance Strengthened Under USAID Assistance Agreement* yang diberikan oleh Amerika Serikat dengan nilai realisasi hibah sebesar USD 271.138,40 atau Rp3.926.355.099,00 yang dibebankan pada Beban Jasa Lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Program USAID Cegah Nomor 112/USAID-INA/BAST-Service/DRG tanggal 31 Desember 2019
 - Nomor Register 23TSV7CA – *The Government of Australia and The Government of Indonesia Relating to the Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)* dengan nilai realisasi hibah sebesar AUD 203.168,01 atau Rp2.840.898.283,83 yang dibebankan pada Beban Jasa Lainnya sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Berupa Jasa Nomor B/4613/PL.02.06/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.

4. Guna memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai, Ombudsman pada Laporan Keuangan Ombudsman telah menerapkan PIPK berdasarkan PMK 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Dalam penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman akun signifikan sebagai objek penilaian PIPK sebagai berikut:
 - Belanja Perjalanan Dinas
 - Belanja Barang Persediaan
5. Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, mengubah struktur Sekretariat Jenderal dari 3 (tiga) Biro menjadi 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Inspektorat. Unit penanggung jawab penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan oleh Bagian Akuntansi dan Pelaporan di bawah Biro Perencanaan dan Keuangan.
6. Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas satu satker, yaitu Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (439624) dan menggunakan Aplikasi SAIBA 2019 dan Aplikasi SIMAK-BMN 2019.
7. Ombudsman Republik Indonesia mengelola satu rekening atas nama Bendahara Pengeluaran Ombudsman Republik Indonesia di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu Rasuna Said dengan nomor rekening 96543728 (BPG182 OMBUDSMAN RI).
8. Penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 *Audited* yang dilakukan pada awal tahun 2020 merupakan salah satu proses terberat dalam siklus proses penyusunan laporan keuangan dikarenakan berada pada masa pandemik *Covid-19* di Indonesia.
Pada tanggal 28 Februari 2020, pertama kali terdeteksi warga Indonesia positif *Covid-19* dan mulai tanggal 1 Maret 2020 pemerintah mengambil langkah dalam pencegahan penularan *Covid-19* di Indonesia dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menyebutkan bahwa PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Dalam rangka mendukung program Pemerintah tersebut, semua K/L dan instansi Pemerintah Pusat/Daerah di Indonesia termasuk Ombudsman RI mengambil kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Office secara terbatas. Dan dalam pelaksanaan berdampak kepada proses penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun Anggaran 2019 *Audited*. Dengan membagi anggota tim penyusunan LK yang melaksanakan WFH atau WFO. Begitu pun tim Pemeriksa BPK RI yang di Ombudsman RI seluruhnya melanjutkan pemeriksaan dengan melaksanakan WFH.

Dengan penerapan sistem kerja WFH pada masa pandemik *Covid-19* tidak menyurutkan semangat Tim Penyusunan LK Ombudsman RI dalam penyesuaian dan mengikuti koreksi yang diberikan oleh Tim Pemeriksa (BPK). Dalam menindaklanjuti hasil koreksi, Tim Penyusun LK Ombudsman RI berkonsultasi melalui *virtual meeting* kepada pembina APK dan Pembina DJKN tidak bertatap muka secara langsung dan secara bertahap.

Tripartit pertama dilaksanakan tanggal 24 Maret 2020 menghasilkan nota kesepakatan sementara berupa 5 (lima) usulan jurnal koreksi. Dilanjutkan pada tanggal 31 Maret 2020 membahas hasil tindak lanjut dari nota kesepakatan sementara bahwa hanya 3 (tiga) usulan jurnal dari 5 usulan jurnal koreksi yang dapat ditindaklanjuti melalui Jurnal Umum dan telah disepakati pada Nota Kesepakatan Final dilampirkan pada Lampiran Pendukung.

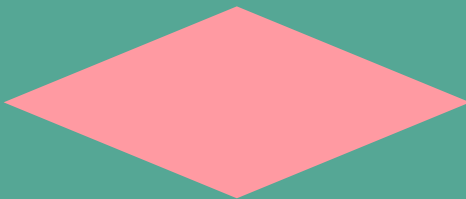
Berdasarkan pada kondisi pandemik *Covid-19* pada saat ini memberikan dampak kepada proses Penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2019 (*Audited*). Segala upaya dan cara dilakukan dalam rangka penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggung jawaban instansi atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 dan periode pelaporan 31 Desember 2019.

Sesuai Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa* dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Ombudsman RI telah menganggarkan Rp644.724.000,00 dalam Operasional Perkantoran dan pemotongan Pagu TA 2020 semula Rp166.309.152.000,00 menjadi Rp137.839.357.920,00.



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 16/04/2020 11:49 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	2,937,682,270	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	75,534,488	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	8,350,871,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	212,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	517,582,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	144,537,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	900,680,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	52,975,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	35,758,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	439,599,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	1,806,636,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	15,475,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	431,890,000
2.0	512111	Allotment Belanja Uang Honor Tetap	0	18,916,552,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	38,270,162,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	9,691,630,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,232,904,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	470,280,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	71,040,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	4,595,047,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	761,135,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	1,990,112,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	2,678,224,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	2,286,180,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	370,548,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	229,344,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,138,944,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	8,442,344,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	1,182,440,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	5,034,753,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	4,035,559,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,048,707,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	24,410,027,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,609,270,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	14,442,675,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	4,701,998,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	460,000,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,447,432,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	139,780,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	4,689,662
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	66,386,750
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,458,076

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 16/04/2020 11:49 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	8,281,527,920	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	161,509	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	121
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	496,262,900	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	136,175,491	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	796,270,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	38,850,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	30,918,032	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	429,450,600	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,617,845,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	15,475,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	428,270,000	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	18,867,330,400	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	37,922,675,711	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,691,078,525	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,156,736,868	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	469,920,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	71,029,839	0
3.0	521211	Belanja Bahan	4,542,522,461	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	713,100,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	2,925,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,946,046,467	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,639,798,188	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,255,651,315	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	338,088,813	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	189,712,218	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,112,885,747	0
3.0	522141	Belanja Sewa	8,213,930,620	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	950,498,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	600,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	5,033,675,162	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,035,275,129	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,047,970,094	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	200,000
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	24,132,243,914	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	539,322,401
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,506,520,000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	300,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14,294,283,881	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	52,333,937
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,687,646,295	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	87,285,467

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 16/04/2020 11:49 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	435,095,917	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	2,991,133
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,437,150,773	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	139,505,000	0
JUMLAH			165,114,794,547	165,114,794,547

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 17/04/2020 10:49 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	1,867,065,556	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	80,704,123	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	403,521
0.0	117111	Barang Konsumsi	976,731,399	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	26,592,174,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	42,673,256,004	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,357,048,000	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	4,174,183,910	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	50,935,475	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	33,911,399,058
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	27,140,960
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	606,667,262
0.0	162151	Software	803,899,234	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	45,000,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	617,873,095	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	294,697,400	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	0	607,679,996
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	600,971,109
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	0	198,773,840
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	116,917,314
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	161,415,619,730
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	75,534,488	0
0.0	391111	Ekuitas	0	27,016,828,550
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	18,637,613,000
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	6,767,253,382
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,689,662
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	66,386,750
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,458,076
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	1,996,209,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,215,729,904
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	8,254,291,960	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	161,509	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	121
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	496,262,900	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 17/04/2020 10:49 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	136,175,491	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	796,270,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	38,850,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	30,918,032	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	429,450,600	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,554,200,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	15,475,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	428,270,000	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	18,867,330,400	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	37,815,363,171	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	9,699,699,575	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,184,699,924	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	469,920,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	71,029,839	0
3.0	521211	Beban Bahan	4,499,372,461	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	713,100,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	2,925,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,946,046,467	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,261,585,648	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	323,451,737	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	185,546,382	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,118,287,885	0
3.0	522141	Beban Sewa	9,371,331,866	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	947,698,000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	600,000
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	11,800,928,544	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,987,777,129	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,076,148,628	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	200,000
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	24,132,243,914	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	539,322,401
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,506,520,000	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	300,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14,235,483,881	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	52,333,937
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,687,646,295	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	87,285,467
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	435,095,917	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	2,991,133
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,438,523,195	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27,140,960	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	270,201,652	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 17/04/2020 10:49 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	136,182,500	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	6,953,812	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,414,309,654	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	244,000	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	120,000	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	20,000	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1,293,994,353	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	218,448	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	167,054,760	0
JUMLAH			253,880,699,173	253,880,699,173

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 16/04/20 11:51 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	75,534,488	(75,534,488)	0	0	131,122,684	(131,122,684)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	75,534,488	(75,534,488)	0	0	131,122,684	(131,122,684)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	69,882,929,000	69,061,212,442	821,716,558	99	59,982,380,000	59,982,337,390	42,610	100
	BELANJA BARANG	92,883,161,000	90,777,751,515	2,105,409,485	98	88,444,311,000	84,234,512,644	4,209,798,356	95
	BELANJA MODAL	1,587,212,000	1,576,655,773	10,556,227	99	3,412,865,000	3,371,458,667	41,406,333	99
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	164,353,302,000	161,415,619,730	2,937,682,270	98	151,839,556,000	147,588,308,701	4,251,247,299	97
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 16/04/20 11:52

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,689,662	0	4,689,662	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	66,386,750	0	66,386,750	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	4,458,076	0	4,458,076	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	75,534,488	0	75,534,488	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	75,534,488	0	75,534,488	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	75,534,488	0	75,534,488	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 17/04/20 10:59
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,598,296,000	8,350,871,000	8,281,527,920	0	8,281,527,920	99.17	69,343,080
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69,000	212,000	161,509	121	161,388	76.18	50,612
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	297,000,000	517,582,000	496,262,900	0	496,262,900	95.88	21,319,100
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	71,357,000	144,537,000	136,175,491	0	136,175,491	94.21	8,361,509
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	357,400,000	900,680,000	796,270,000	0	796,270,000	88.41	104,410,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	32,500,000	52,975,000	38,850,000	0	38,850,000	73.34	14,125,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	15,400,000	35,758,000	30,918,032	0	30,918,032	86.46	4,839,968
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	267,500,000	439,599,000	429,450,600	0	429,450,600	97.69	10,148,400
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,210,126,000	1,806,636,000	1,617,845,000	0	1,617,845,000	89.55	188,791,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	9,600,000	15,475,000	15,475,000	0	15,475,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	249,855,000	431,890,000	428,270,000	0	428,270,000	99.16	3,620,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	7,109,103,000	12,696,215,000	12,271,206,452	121	12,271,206,331	96.65	425,008,669
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	17,548,105,000	18,916,552,000	18,867,330,400	0	18,867,330,400	99.74	49,221,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	17,548,105,000	18,916,552,000	18,867,330,400	0	18,867,330,400	99.74	49,221,600
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	31,716,799,000	38,270,162,000	37,922,675,711	0	37,922,675,711	99.09	347,486,289
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	31,716,799,000	38,270,162,000	37,922,675,711	0	37,922,675,711	99.09	347,486,289
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	56,374,007,000	69,882,929,000	69,061,212,563	121	69,061,212,442	98.82	821,716,558
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,677,748,000	9,691,630,000	9,691,078,525	0	9,691,078,525	99.99	551,475
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,320,000,000	1,232,904,000	1,156,736,868	0	1,156,736,868	93.82	76,167,132
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	624,600,000	470,280,000	469,920,000	0	469,920,000	99.92	360,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	71,040,000	71,029,839	0	71,029,839	99.99	10,161
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	11,622,348,000	11,465,854,000	11,388,765,232	0	11,388,765,232	99.33	77,088,768
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	4,196,860,000	4,595,047,000	4,542,522,461	0	4,542,522,461	98.86	52,524,539
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,531,885,000	761,135,000	713,100,000	2,925,000	710,175,000	93.69	50,960,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,062,000,000	1,990,112,000	1,946,046,467	0	1,946,046,467	97.79	44,065,533
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,790,745,000	7,346,294,000	7,201,668,928	2,925,000	7,198,743,928	98.03	147,550,072
5218	Belanja Barang Persediaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 17/04/20 10:59
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,453,800,000	2,678,224,000	2,639,798,188	0	2,639,798,188	98.57	38,425,812
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,453,800,000	2,678,224,000	2,639,798,188	0	2,639,798,188	98.57	38,425,812
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,548,000,000	2,286,180,000	2,255,651,315	0	2,255,651,315	98.66	30,528,685
522112	Belanja Langganan Telepon	394,800,000	370,548,000	338,088,813	0	338,088,813	91.24	32,459,187
522113	Belanja Langganan Air	138,000,000	229,344,000	189,712,218	0	189,712,218	82.72	39,631,782
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	752,400,000	1,138,944,000	1,112,885,747	0	1,112,885,747	97.71	26,058,253
522141	Belanja Sewa	11,436,882,000	8,442,344,000	8,213,930,620	0	8,213,930,620	97.29	228,413,380
522151	Belanja Jasa Profesi	1,549,300,000	1,182,440,000	950,498,000	600,000	949,898,000	80.38	232,542,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,573,358,000	5,034,753,000	5,033,675,162	0	5,033,675,162	99.98	1,077,838
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	20,392,740,000	18,684,553,000	18,094,441,875	600,000	18,093,841,875	96.84	590,711,125
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,663,800,000	4,035,559,000	4,035,275,129	0	4,035,275,129	99.99	283,871
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,170,920,000	3,048,707,000	3,047,970,094	200,000	3,047,770,094	99.98	936,906
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	5,834,720,000	7,084,266,000	7,083,245,223	200,000	7,083,045,223	99.99	1,220,777
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	24,323,850,000	24,410,027,000	24,132,243,914	539,322,401	23,592,921,513	98.86	817,105,487
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,524,450,000	1,609,270,000	1,506,520,000	300,000	1,506,220,000	93.62	103,050,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14,044,165,000	14,442,675,000	14,294,283,881	52,333,937	14,241,949,944	98.97	200,725,056
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5,043,150,000	4,701,998,000	4,687,646,295	87,285,467	4,600,360,828	99.69	101,637,172
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	44,935,615,000	45,163,970,000	44,620,694,090	679,241,805	43,941,452,285	98.8	1,222,517,715
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	405,000,000	460,000,000	435,095,917	2,991,133	432,104,784	94.59	27,895,216
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	405,000,000	460,000,000	435,095,917	2,991,133	432,104,784	94.59	27,895,216
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	93,434,968,000	92,883,161,000	91,463,709,453	685,957,938	90,777,751,515	98.47	2,105,409,485
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	770,000,000	1,447,432,000	1,437,150,773	0	1,437,150,773	99.29	10,281,227
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	770,000,000	1,447,432,000	1,437,150,773	0	1,437,150,773	99.29	10,281,227
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	139,780,000	139,780,000	139,505,000	0	139,505,000	99.8	275,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	139,780,000	139,780,000	139,505,000	0	139,505,000	99.8	275,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	909,780,000	1,587,212,000	1,576,655,773	0	1,576,655,773	99.33	10,556,227

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 17/04/20 10:59
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	150,718,755,000	164,353,302,000	162,101,577,789	685,958,059	161,415,619,730	98.63	2,937,682,270

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 16/04/20 11:52

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia							
4051	Perencanaan dan Keuangan	4,400,000,000	4,257,997,000	4,176,941,606	76,541,817	4,100,399,789	96.3	157,597,211
5093	Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	2,700,000,000	2,458,000,000	2,435,347,124	15,682,687	2,419,664,437	98.44	38,335,563
5094	Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	101,968,755,000	115,987,305,000	114,686,189,131	97,223,668	114,588,965,463	98.79	1,398,339,537
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	109,068,755,000	122,703,302,000	121,298,477,861	189,448,172	121,109,029,689	98.855	1,594,272,311
06	Program Pengawasan Pelayanan Publik							
5618	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	15,530,000,000	15,777,888,000	15,538,428,251	187,195,841	15,351,232,410	97.3	426,655,590
5619	Pencegahan Maladministrasi	25,430,000,000	25,182,112,000	24,575,692,953	305,015,390	24,270,677,563	96.38	911,434,437
5731	Penjaminan Mutu	690,000,000	690,000,000	688,978,724	4,298,656	684,680,068	99.23	5,319,932
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	41,650,000,000	41,650,000,000	40,803,099,928	496,509,887	40,306,590,041	97.967	1,343,409,959
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	150,718,755,000	164,353,302,000	162,101,577,789	685,958,059	161,415,619,730	98.63	2,937,682,270
	JUMLAH	150,718,755,000	164,353,302,000	162,101,577,789	685,958,059	161,415,619,730	98.63	2,937,682,270

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 17/04/20 10:58
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,458,076	1,952,852	2,505,224	128.285
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,458,076	1,952,852	2,505,224	128.285
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	4,458,076	1,952,852	2,505,224	128.285
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	68,863,018,942	60,219,273,830	8,643,745,112	14.354
Beban Persediaan	2,414,329,654	2,453,570,050	(39,240,396)	(1.599)
Beban Barang dan Jasa	44,756,228,088	35,795,536,505	8,960,691,583	25.033
Beban Pemeliharaan	7,064,089,757	5,557,003,631	1,507,086,126	27.12
Beban Perjalanan Dinas	44,314,757,069	39,741,146,847	4,573,610,222	11.509
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 17/04/20 10:58
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4,879,002,119	5,353,182,193	(474,180,074)	(8.858)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	218,448	(412,162)	630,610	(153.001)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	172,291,644,077	149,119,300,894	23,172,343,183	15.539
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(172,287,186,001)	(149,117,348,042)	(23,169,837,959)	15.538
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	(6,341,724)	6,341,724	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	27,110,382	(27,110,382)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	33,452,106	(33,452,106)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,989,020,963	391,197,438	1,597,823,525	408.444
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,283,015,316	587,251,970	2,695,763,346	459.047
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,293,994,353	196,054,532	1,097,939,821	560.018
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,989,020,963	384,855,714	1,604,165,249	416.823
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(170,298,165,038)	(148,732,492,328)	(21,565,672,710)	14.5
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(170,298,165,038)	(148,732,492,328)	(21,565,672,710)	14.5

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 17/04/20 10:51 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --rekon17

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	27,016,828,550	27,852,569,979	(835,741,429)	(3.001)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(170,298,165,038)	(148,732,492,328)	(21,565,672,710)	14.5
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	18,637,613,000	439,564,882	18,198,048,118	4,140.0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	18,637,613,000	0	18,637,613,000	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	300,756,642	(300,756,642)	(100)
LAIN-LAIN	0	138,808,240	(138,808,240)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	168,107,338,624	147,457,186,017	20,650,152,607	14.004
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	16,446,786,586	(835,741,429)	17,282,528,015	(2,067.9
EKUITAS AKHIR	43,463,615,136	27,016,828,550	16,446,786,586	60.876

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 110

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tgl. Cetak 17/04/2020 10:57 AM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,867,065,556	3,113,505,376	(1,246,439,820)	(40.03)
Piutang Bukan Pajak	80,704,123	37,014,633	43,689,490	118.03
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(403,521)	(185,073)	(218,448)	118.03
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	80,300,602	36,829,560	43,471,042	118.03
Persediaan	976,731,399	837,246,364	139,485,035	16.66
JUMLAH ASET LANCAR	2,924,097,557	3,987,581,300	(1,063,483,743)	(26.67)
ASET TETAP				
Tanah	26,592,174,000	7,315,400,000	19,276,774,000	263.51
Peralatan dan Mesin	42,673,256,004	41,357,097,591	1,316,158,413	3.18
Gedung dan Bangunan	1,357,048,000	0	1,357,048,000	0.00
Aset Tetap Lainnya	4,225,119,385	4,225,119,385	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(34,545,207,280)	(29,900,569,573)	(4,644,637,707)	15.53
JUMLAH ASET TETAP	40,302,390,109	22,997,047,403	17,305,342,706	75.25
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	848,899,234	764,229,234	84,670,000	11.08
Aset Lain-lain	912,570,495	815,822,395	96,748,100	11.86
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,407,424,945)	(1,172,640,533)	(234,784,412)	20.02
JUMLAH ASET LAINNYA	354,044,784	407,411,096	(53,366,312)	(13.10)
JUMLAH ASET	43,580,532,450	27,392,039,799	16,188,492,651	59.10
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	116,917,314	375,211,249	(258,293,935)	(68.84)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	116,917,314	375,211,249	(258,293,935)	(68.84)
JUMLAH KEWAJIBAN	116,917,314	375,211,249	(258,293,935)	(68.84)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	43,463,615,136	27,016,828,550	16,446,786,586	60.88
JUMLAH EKUITAS	43,463,615,136	27,016,828,550	16,446,786,586	60.88
JUMLAH EKUITAS	43,463,615,136	27,016,828,550	16,446,786,586	60.88
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	43,580,532,450	27,392,039,799	16,188,492,651	59.10



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-1399/WPB.11/KP.182/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode April 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	150,718,755,000	150,718,755,000	0
2	Belanja	37,855,586,992	37,855,586,992	0
3	Pengembalian Belanja	-85,446,172	-85,446,172	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,146,176	2,146,176	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,000,000,000	2,000,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,000,000,000	2,000,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan April tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 150,718,755,000

SAI/SA-BUN : 150,718,755,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 37,855,586,992

SAI/SA-BUN : 37,855,586,992

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -85,446,172

SAI/SA-BUN : -85,446,172

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 2,146,176

SAI/SA-BUN : 2,146,176

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-24550/WPB.11/KP.182/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Mei 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	150,718,755,000	150,718,755,000	0
2	Belanja	56,850,820,646	56,850,820,646	0
3	Pengembalian Belanja	-211,014,622	-211,014,622	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	42,156,388	42,156,388	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,000,000,000	2,000,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,000,000,000	2,000,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Mei tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 150,718,755,000

SAI/SA-BUN : 150,718,755,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 56,850,820,646

SAI/SA-BUN : 56,850,820,646

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -211,014,622

SAI/SA-BUN : -211,014,622

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 42,156,388

SAI/SA-BUN : 42,156,388

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-51876/WPB.11/KP.182/2019

Pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Juni 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	150,718,755,000	150,718,755,000	0
2	Belanja	67,012,949,358	67,012,949,358	0
3	Pengembalian Belanja	-225,767,308	-225,767,308	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	42,156,388	42,156,388	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,000,000,000	2,000,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,000,000,000	2,000,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Juni tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 150,718,755,000

SAI/SA-BUN : 150,718,755,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 67,012,949,358

SAI/SA-BUN : 67,012,949,358

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -225,767,308

SAI/SA-BUN : -225,767,308

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 42,156,388

SAI/SA-BUN : 42,156,388

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,000,000,000

SAI/SA-BUN : 2,000,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-68021/WPB.11/KP.182/2019

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Juli 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	150,718,755,000	150,718,755,000	0
2	Belanja	87,104,608,617	87,104,608,617	0
3	Pengembalian Belanja	-309,036,433	-309,036,433	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	68,688,488	68,688,488	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,600,000,000	1,600,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,600,000,000	1,600,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Juli tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 150,718,755,000

SAI/SA-BUN : 150,718,755,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 87,104,608,617

SAI/SA-BUN : 87,104,608,617

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -309,036,433

SAI/SA-BUN : -309,036,433

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 68,688,488

SAI/SA-BUN : 68,688,488

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 1,600,000,000

SAI/SA-BUN : 1,600,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 1,600,000,000

SAI/SA-BUN : 1,600,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-88898/WPB.11/KP.182/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Agustus 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	150,718,755,000	150,718,755,000	0
2	Belanja	98,489,820,345	98,489,820,345	0
3	Pengembalian Belanja	-398,867,374	-398,867,374	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	69,320,988	69,320,988	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,600,000,000	1,600,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,600,000,000	1,600,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 150,718,755,000

SAI/SA-BUN : 150,718,755,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 98,489,820,345

SAI/SA-BUN : 98,489,820,345

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -398,867,374

SAI/SA-BUN : -398,867,374

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 69,320,988

SAI/SA-BUN : 69,320,988

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 1,600,000,000

SAI/SA-BUN : 1,600,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 1,600,000,000

SAI/SA-BUN : 1,600,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-106591/WPB.11/KP.182/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode September 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	150,718,755,000	150,718,755,000	0
2	Belanja	113,390,774,973	113,390,774,973	0
3	Pengembalian Belanja	-433,496,915	-433,496,915	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	71,866,488	71,866,488	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,600,000,000	1,600,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,600,000,000	1,600,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan September tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 150,718,755,000

SAI/SA-BUN : 150,718,755,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 113,390,774,973

SAI/SA-BUN : 113,390,774,973

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -433,496,915

SAI/SA-BUN : -433,496,915

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 71,866,488

SAI/SA-BUN : 71,866,488

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 1,600,000,000

SAI/SA-BUN : 1,600,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 1,600,000,000

SAI/SA-BUN : 1,600,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-131207/WPB.11/KP.182/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Oktober 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	164,353,302,000	164,353,302,000	0
2	Belanja	127,125,513,907	127,125,513,907	0
3	Pengembalian Belanja	-478,978,164	-478,978,164	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	72,766,488	72,766,488	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,600,000,000	1,600,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,600,000,000	1,600,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Oktober tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 164,353,302,000

SAI/SA-BUN : 164,353,302,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 127,125,513,907

SAI/SA-BUN : 127,125,513,907

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -478,978,164

SAI/SA-BUN : -478,978,164

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 72,766,488

SAI/SA-BUN : 72,766,488

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 1,600,000,000

SAI/SA-BUN : 1,600,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 1,600,000,000

SAI/SA-BUN : 1,600,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-156477/WPB.11/KP.182/2019

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Nopember 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	164,353,302,000	164,353,302,000	0
2	Belanja	140,750,101,694	140,750,101,694	0
3	Pengembalian Belanja	-554,105,511	-554,105,511	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	75,106,988	75,106,988	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,531,390,000	2,531,390,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,531,390,000	2,531,390,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 164,353,302,000

SAI/SA-BUN : 164,353,302,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 140,750,101,694

SAI/SA-BUN : 140,750,101,694

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -554,105,511

SAI/SA-BUN : -554,105,511

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 75,106,988

SAI/SA-BUN : 75,106,988

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 2,531,390,000

SAI/SA-BUN : 2,531,390,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 2,531,390,000

SAI/SA-BUN : 2,531,390,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Setiyono
NIP.197311161996021001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-185354/WPB.11/KP.182/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA VII, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2019.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	164,353,302,000	164,353,302,000	0
2	Belanja	162,101,577,789	162,101,577,789	0
3	Pengembalian Belanja	-685,958,059	-685,958,059	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	75,534,488	75,534,488	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	6,767,253,382	6,767,253,382	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Nama Belum Direkam
NIP Belum Direkam



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (439624)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 164,353,302,000

SAI/SA-BUN : 164,353,302,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 162,101,577,789

SAI/SA-BUN : 162,101,577,789

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -685,958,059

SAI/SA-BUN : -685,958,059

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 75,534,488

SAI/SA-BUN : 75,534,488

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 6,767,253,382

SAI/SA-BUN : 6,767,253,382

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

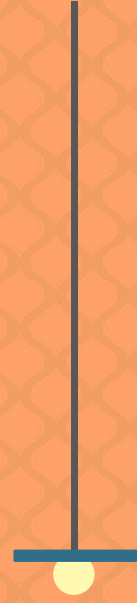
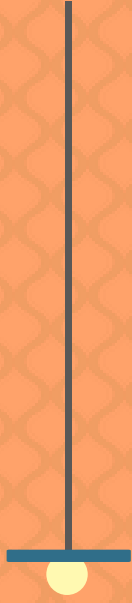
Nama Belum Direkam
NIP Belum Direkam



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP.197309161993111001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah



**JL. HR. RASUNA SAID KAV. C-19 KUNINGAN
JAKARTA SELATAN 12920**

**TELP. (021) 5296 0894-95, 5296 0904-05 FAX: (021) 5296 0907-08
WWW.OMBUDSMAN.GO.ID**